

PERANAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh: Susi Sugiyarsih¹

Abstrak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimulai dari pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga tahun 2012 selalu mengalami pertumbuhan, dan yang lebih menggembirkannya pula nilai ekspor dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukuplah besar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor potensial yang harus diupayakan lagi oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat membentuk pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, dan juga sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil Menengah, Ekonomi, Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat.

¹Dosen Tetap Yayasan UNTAG Cirebon, email: susi@untagcirebon.ac.id

A. PENDAHULUAN

Terus merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar beberapa pekan belakangan ini. Nilai mata uang akan cenderung meningkat apabila permintaan lebih besar dari pasokan yang tersedia, sedangkan nilai mata uang akan menurun apabila permintaan kurang dari suplai yang tersedia. Permintaan dan penawaran atas hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor dalam aktivitas keuangan sebuah negara. Faktor yang menyebabkan nilai tukar mata uang berfluktuasi antara lain; tingkat suku bunga, tingkat inflasi, neraca perdagangan, hutang publik, tingkat rasio ekspor impor, hasil produksi domestik, tingkat pengangguran, tingkat pendapatan dan kestabilan ekonomi dan politik.

Lalu bagaimana untuk kembali menstabilkan nilai tukar rupiah? Salah satu caranya adalah dengan membedakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan menyediakan pasar atas hasil produksi. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai lebih aman karena sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama ini lebih banyak menggunakan bahan baku lokal, sehingga tidak terpuak dengan naiknya dolar. Pasca krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Alasannya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di negara berkembang hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini dapat menjadi tumpuan bagi stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Hingga awal tahun 2014 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai 56,5 juta unit, dan 98,9 persen adalah usaha mikro, sedangkan jumlah koperasi di Indonesia mencapai 200.808 unit.

Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa juga sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan. Untuk itu, dalam proses pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya.

Pemberdayaan masyarakat menjadi solusi jangka panjang sekaligus mendidik masyarakat untuk mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu membentuk pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan, memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, dan juga sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

Yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.

Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah:

- Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.
- Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.
- Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.
- Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995 dalam Kartasmita, 1996). Sedangkan, Budimanta & Rudito (2007), memasukkan konsep pemberdayaan masyarakat ini ke dalam ruang lingkup *Community Development*. Pemberdayaan diterjemahkan sebagai program-program yang berkaitan dengan upaya memperluas akses dan kapabilitas masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

Menurut Priyono dan Pranarka (1996), manusia merupakan subyek dari dirinya sendiri. Proses suatu pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya meningkatkan keahlian masyarakat untuk kemudian menjadikan masyarakat tersebut dapat memiliki daya saing sebagai penunjang kemandiriannya dalam hal ekonomi.

C. PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu cara yang dipilih pemerintah untuk kembali menstabilkan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Apa alasannya? Selain Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah terbukti tangguh, ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, karena bertahan dari krisis ekonomi, di mana sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Kepada Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008, beliau mengemukakan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu survive karena, **pertama**, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak memiliki utang luar negeri. **Kedua**, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap *unbankable*. **Ketiga**, menggunakan input lokal. **Keempat**, berorientasi ekspor.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan yang selanjutnya harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif, serta persoalan-persoalan yang menghambat usaha-usaha pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus dihilangkan.

Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 2010 -2012

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012
1	Jumlah UMKM	Unit	53 823	55 206	56 534
			732	444	592
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	%	2.01	2.57	2.41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Oran	99 401	101 722	107 657
		g	775	458	509
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	%	3.32	2.33	5.83
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1 282 571.80	1 369 326.00	1 504 928.20
6	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	%	5.77	6.76	9.90
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	175 894.89	187 441.82	208 067.00

8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	%	8.41	6.56	11.00
---	----------------------------------	---	------	------	-------

(sumber: <http://www.bps.go.id>)

Dari tabel diatas dapat dilihat, pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga tahun 2012 selalu mengalami pertambahan, dan yang lebih mengembirakannya pula nilai ekspor dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukuplah besar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor potensial yang harus digalakan lagi oleh pemerintah.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimulai dari pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Untuk mencapai keberhasilan tentu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan, antara lain: (1) Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim dan suasana untuk berkembang. (2) Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif dalam memperkembangkannya. (3) Penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses kepeluang-peluang. Upaya lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan dalam peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, dan fasilitas-fasilitas yang ada.

D. KESIMPULAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat dijadikan andalan. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga tahun 2012 selalu mengalami pertambahan, dan yang lebih mengembirakannya pula nilai ekspor dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukuplah besar. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor potensial yang harus digalakan lagi oleh pemerintah.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimulai dari pemberdayaan masyarakat kecil. Untuk mencapai keberhasilan perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan, antara lain: (1) Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim dan suasana untuk berkembang. (2) Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif dalam memperkembangkannya. (3) Penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses kepeluang-peluang. Selain itu, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Budimanta, A., Prasetyo, A. & Rudito, B. 2007. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini (edisi kedua)*. ICSD. Jakarta.
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Onny S. Prijono dan A.M.W Pranark. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS,
- Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
- Biro Pusat Statistik (www.bps.go.id)